

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA BANGUN JAYA KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO

Oleh : Abd. Khalid Hs. Pandipa

Abstrak : Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Naiknya harga tebus beras miskin (Raskin) b) kurang tepatnya waktu dalam pelaksanaan pendistribusian raskin. c) kualitas beras miskin yang di salurkan kurang layak, masi sering di temukan ketidak sesuaian kualitas beras antara lain berbau apek, berkutu dan berwarna kuning, dan beras patah-patah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempenaruhi implementasi prokram beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Desa Bangun jaya Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso yang mencakup aspek-aspek isi kebijakan yang terdiri dari: Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan teori yang di gunakan oleh Edward III. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kulitatif.

Kata Kunci : *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin)*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan yang melanda diberbagai negara baik itu negara berkembang maupun negara maju merupakan masalah yang cukup kompleks tak terkecuali bangsa Indonesia yang notabene termasuk dalam kategori Negara berkembang yang berada di kawasan Asia atau yang lebih spesifikan yang terletak di Asia bagian tenggara. Adapun kemiskinan itu sendiri bisa dibilang suatu kondisi dimana seseorang dengan kondisi keterbatasan materi sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan papan, pangan maupun sandang. Sejalan dengan fenomena tersebut pemerintah juga selalu berupaya membantu meringankan beban masyarakat miskin

lewat beberapa program bantuan yang salah satunya program tersebut membantu masyarakat miskin untuk dapat meringankan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok pangan seperti beras.

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang menyumbang konsumsi energi cukup potensial bagi masyarakat pada umumnya, akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan pangan seperti beras itu sendiri masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok pangan tersebut. Dari pernyataan tersebut masyarakat yang tidak mampu dalam kategori ini digolongkan ke dalam masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini mendapat perhatian dari pemerintah dengan diluncurkannya program

bantuan sosial pemerintah yang pada tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari dan dalam hal ini bentuk program disalurkan melalui program raskin atau beras miskin. Jadi kesimpulannya program raskin ialah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program raskin sendiri dilaksanakan melalui koordinasi yang matang antara instansi/lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan proses koordinasi dilaksanakan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengawasan, pengendalian dan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Program Beras Miskin sendiri sudah diimplementasikan di Kabupaten Poso sejak diberlakukannya instruksi Presiden No.1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pemberasan Nasional selain itu Pemerintah Daerah kabupaten Poso juga telah berupaya agar masyarakat di Kecamatan Pamona Selatan khususnya di Desa Bangun jaya mendapatkan kesejahteraan yang layak, namun implementasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan diakibatkan oleh banyak kendala yang terjadi dilapangan dan dengan adanya kendala tertentu terkadang membuat hasil dari program tersebut belum optimal hasilnya. sehingga pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan kata lain kondisi faktual di masyarakat yang tidak sesuai dengan program yang telah di

jalankan, akibatnya menimbulkan permasalahan. Adapun berikut adalah beberapa bukti dari belum efektifnya implementasi program raskin di Kabupaten Poso Kecamatan Pamona Selatan, khususnya di Desa Bangun jaya yang ditunjukkan dengan statement yang disampaikan oleh warga setempat melalui salah satu media masa lokal yang di antaranya adalah sebagai berikut: Ketua RT 02 RW 02 Desa Bangun jaya, Kecamatan Pamona Selatan, Sukiman selaku ketua RT 2 mempertanyakan kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang didistribusikan Bulog. Menurutnya kualitas beras tak memadai untuk dikonsumsi. Pada hari pertama didistribusi, itu ada beberapa beras yang rusak. Kemudian dia menegaskan mengenai kualitas beras yang tidak bagus menjadi kendala untuk mendistribusikannya. Menurut Sukiman, meski untuk keluarga miskin, tak berarti kualitas beras yang diberikan harus rendah. “ karna itu tidak layak untuk konsumsi. Meski untuk masyarakat miskin, kita harap tidak seperti itu. Kualitas beras juga harus diperhatikan juga,” paparnya. Menurutnya, sebelum didistribusikan hendaknya beras tersebut diperiksa terlebih dahulu. Jangan sampai yang didistribusikan ke masyarakat kualitasnya tak layak lagi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Secara harfiah, sesuai dengan adanya peneliti kualitatif adalah jenis peneliti yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.

kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta, kualitas, nilai atau makna hanya dapat di ungkapkan dan di jelaskan secara linguistik, bahasa atau kata-kata. Oleh karena itu, bentuk data yang di gunakan bukan berbentuk angka, bilangan, skor atau nilai, peringkat atau frekuensi biasanya di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistik.

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan untuk program-program.

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat di pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). misalnya, Implementasi yang di konsptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang di tunjukan agar keputusan-keputusan yang di terima oleh lembaga legislatif biasa di jalankan. Implementasi juga bisa di artikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah di rencanakan medapat dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Akhirnya, pada tingkat apstarsi yang paling tinggi, dampak Implementasi

mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa di ukur dalam masalah yang luas yang di kaitkan dengan program. Sekalipun implementasi merupakan fenomena kompleks, konsep itu bisa di pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implmentasi juga melibatkan aktor, organisasi, dan tehnik-tehnik pengendalian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program beras raskin di Desa Bangun jaya Kecamatan Pamona selatan Kabupten Poso dengan menggunakan teori Edward III dapat penulis diskrisikan dan berikan analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Komunikasi

Salah satu penentu utama dari suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Komunikasi di perlukan sebagai proses penyamapian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Dengan adanya komunikasi yang baik antara yang membuat kebijakan dengan target atau sasaran dari kebijakan publik tersebut, maka implementasi akan menjadi efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan merka kerjakan dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi di perlukan agar pembuat keputusan dan implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan ke masyarakat.

Program Raskin adalah sebuah program yang di rancang oleh pemerintah, program tersebut bertujuan untuk

mengurangi beban bagi rumah tangga miskin melalui distribusi beras murah. Berdasarkan buku pedoman umum raskin pada tahun 2014 telah di atur alokasi beras miskin untuk masyarakat miskin sebesar 15 kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga 1.600,/kg Netto di titik distribusi. Sementara yang bertanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ketitik distribusi di Desa di pegang oleh Perum BULOG.

Agar pelaksana program berjalan dengan baik dan lancar, perlu dilakukan penjelasan atau sosialisasi berkaitan dengan program Raskin tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan proses implementasi berkaitan dengan komunikasi yang terjalin saat ini kurang baik. Karna pelaksanaan sosialisasi sangat-sangat jarang di lakukan sehingga pengetahuan masyarakat tentang Raskin sangat minim.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kedua dalam model implementasi yang di kemukakan oleh Edward III. Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi. Tanpa tersedianya sumber daya yang memadai maka pelaksana implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumber daya ini meliputi staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait pelaksanaan program, adanya wewenang yang menjamin bahwa program dapat di arahkan kepada sebagai mana yang diharapkan, serta adanya fasilita-fasilitas yang pendukung yang dapat di pakai untuk

melakukan kegiatan program. Dalam pengimplementasian kebijakan sumber daya manusia sebagai kunci bagi diselenggarakanya kebijakan karna manusia berbeda diposisi sebagai pengolah kebijakan dan merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan hasil atau tidaknya suatu implementasi program.

Dalam pelaksanaan implementasi program Raskin untuk masyarakat miskin di Desa Bangun Jaya terdapat kendala yang di hadapi yaitu seperti keterbatasan sumber daya yang di dapat. Dalam hal ini, yang di maksud dengan sumber daya dalam implementasi program raskin untuk masyarakat miskin di Desa Bangn Jaya adalah sumber daya dari beras miskin itu sendiri berupa kualitas beras miskin yang didistribusikan kepada masyarakat yang penerima Raskin. Masih terdapat masalah, dalam hal ini masyarakat yang menerima beras miskin terkadang mendapatkan beras miskin yang kurang layak untuk di konsumsi dan masalah lainnya lagi masi ada kendala dalam pengambilan beras miskin yang telah di temukan tidak sesuai dengan waktunya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang di inginkan oleh para pembuat keputusan awal. Apa bila suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan di lakukan tetapi

juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Raskin di Desa Bangun Jaya masi ada saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan salah satunya seperti kurang tepatnya waktu dalam pendistribusian Raskin di karenakan implementor yang menguasai substansi kebijakan yang di laksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam beberapa hal, protes masyarakat masi bermunculan dalam proses pelaksanaan implementasi salah satunya mengenai waktu.

4. Struktur Organisasi

Membahas badan pelaksana kebijakan, tidak bisa dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dengan badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga ada dalam Organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating Procedures* atau SOP)

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Dalam pelaksanaan suatu program melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam suatu organisasi, maka tidak diherankan jika masyarakat dalam hal ini mengalami masalah dan ingin mengurusnya maka mereka akan merasa kebingungan jika terlalu banyak pihak yang bekerja di dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan oleh peneliti sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program beras miskin (RASKIN) di Desa Bangun Jaya Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso belum berhasil, adapun faktor-faktor yang di maksud di antaranya adalah:

1. Komunikasi

Dalam implementasi program beras Raskin di Desa Bangun jaya masi mengalami kurang komunikasi yang di lakukan implementor. Hal hal tersebut dapat di ketahui dari pernyataan masyarakat yang menyatakan kurangnya sosialisasi mengenai Raskin. Apabila komunikasi kurang efektif maka penyampaian dari substansi kebijakan sehingga apa yang di harapkan tidak sesuai dari kebijakan tersebut. Salah satu penyebab masi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai raskin dikarenakan kurangnya komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan tentang raskin kurang dipahami.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi. Tanpa kesediaan sumberdaya yang memadai maka pelaksanaan implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumberdaya anggaran dan fasilitas. Dalam hal ini, sumber daya manusia dalam hal memberikan pelayanan untuk pendistribusian raskin masih belum optimal, di lihat dari sumberdaya anggaran masi banyak masyarakat yang belum mengambil raskin di karnakan belum cukup uang untuk menebus, dan dilihat dari sumberdaya fasitas masi terkedala berupa tempa dan ruangan penyimpanan raaskin yang kurang memadai.

3. Disposisi

Disposisi atu sikap dari pelaksana kebijakan dalam proses implementasi program raskin mengenai masalah dari kebiakan yang di jalankan tidak cukup baik untuk membentuk sikap atau disposisi implementor yang baik, dalam hal ini masi banyak masyarakat miskin yang mengeluh mengenai masalah keterlambatan pendistribusian raskin kepada masyarakat miskin mengakibatkan sikap pelaksana di Desa dalam menjalankan tugasnya sehingga akan memungkinkan pihak Desa melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan masalah yang berbelit-belit bahkan kritik dan masukan dari masyarakat sering di tunjukan kepada sikap implementor tetapi kurang di dengar atau kurang dipedulikan dari masukan masyarakat tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Program raskin di Desa Bangun jaya yang terkait dalam bidang tugas kegiatan yang melakukan program raskin melibatkan banyak pihak sehingga tidak mudah untuk menyatukan langkah dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Zaid. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Yayasan Pancur Siwah
- Abdul, Wahab Solici.2005. Analisis Kebijakanaksanaan(Dari Formulasi Ke *Implementasi Kebijakananaa Negara*)Jakarta.Bumi Aksara
- Agustino,leo.2008.*Dasar-dasar Kebijakan Publik*.Bandung:Alfabeta
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Puataka Belajar.
- Bambang Sunggono,1994.*Hukum dan Kebijakanaksanaan Publik*..Jakarta:Sinar Grafika
- BPS.2011*Perkembangan Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*.Jakarta:BPS Indonesia
- Everroes. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik*. Malang: PT Program Penguatan Simpul Demokrasi
- Hartomo,H dan Aziz Arnicun ,2004,*Ilmu Dasar Sosial* cet.6.Jakarta:Bumi Aksara
- Indiahono, Widyanto. 2009. *Administrasi Publik: Model dan Konsep*. Yogyakarta: Gaya Media